

## INTISARI

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah karakteristik daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran legislatif, luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan variabel dependennya berupa belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis berupa regresi data panel yang menggunakan program *evIEWS 10*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 9 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016-2021. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)) dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran legislatif, variabel SiLPA, variabel DBH dan variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel PAD dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Kata kunci:** Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Luas Wilayah, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus

## **ABSTRACT**

*The capital expenditure budget is based on regional needs for facilities and infrastructure, both for the smooth implementation of government tasks and for public facilities. This study aims to analyze whether regional characteristics have a significant influence on capital expenditure in district/city governments in Bengkulu. The independent variables used in this study are the size of the legislature, the size of the area, Local Own Revenue (PAD), Remaining Budget Calculations (SiLPA), Profit Sharing Funds (DBH), and Special Allocation Funds (DAK), while the dependent variable is capital expenditure. This research is a quantitative study with an analytical tool in the form of panel data regression using the Eviews 10 program. The samples used in this study were 9 regencies and 1 city in Bengkulu Province for the 2016-2021 fiscal year. The type of data used is secondary data obtained from the website of the Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)) and Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu. The results of this study indicate that the variable size of the legislature, SiLPA, DBH and DAK have a significant effect on capital expenditure, while the PAD and the size of the area have no effect on capital expenditure.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Legislative Size, Area Size, Regional Original Revenue, SiLPA, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund*